

KERAWANAN PANGAN

Kerawanan pangan adalah kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi pertumbuhan dan kesehatan.

Kondisi rawan pangan disebabkan oleh :

(1) tidak adanya akses secara ekonomi oleh individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup;

(2) tidak adanya akses secara fisik oleh individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup;

(3) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga;

(4) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga.

Hal yang perlu diingat kita ingat :

Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan oleh tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan akan memperburuk konsumsi zat gizi dari pangan sendiri.

Seksi Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat bertugas untuk :

1. Melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah;
2. Menyiapkan bahan penanganan kerawanan pangan Daerah
3. Menyiapkan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

Saat ini Seksi Kerawanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat memiliki 3 (tiga) kegiatan utama yaitu :

a) Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kab. Kutai Barat atau FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas)

Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Lebih jauh dengan FSVA dapat diperlihatkan dengan cepat di mana daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan serta mengapa daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan. FSVA dapat menyokong informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan sasaran serta

intervensi kerawanan pangan dan gizi. Guna membantu percepatan dan ketepatan pengambilan keputusan terkait dengan ketahanan pangan dan kerentanan pangan perlu dibuat Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA).

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. **FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan. FSVA Kabupaten Kutai Barat di lihat dari 3 Aspek yaitu (1) Ketersediaan Pangan, (2) Akses Pangan, dan (3) Pemanfaatan Pangan.**

b) Penyelenggaran dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten Kutai Barat.

Cadangan pangan ada 2, yaitu cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, baik DKP Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sedangkan Cadangan pangan masyarakat adalah cadangan pangan yang tersedia di Gapoktan LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) dan Lumbung Pangan binaan DKP.

Potensi kerawanan pangan di Kutai Barat masih cukup tinggi yang diakibatkan oleh berbagai faktor antara lain: kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan terjadinya bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan cadangan pangan masyarakat. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan cadangan pangan pemerintah mengingat adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. **Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.**

c) Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi

Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi merupakan rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data/ informasi, pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan.

Penanganan kerawanan pangan sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya kejadian perlu dilakukan penanganan secara cepat dan tepat. Penanganan yang terlambat, akan dapat memicu terjadinya kerawanan pangan yang berkepanjangan dan dalam periode yang lama akan menjadi kerawanan pangan yang kronis. Untuk mengoptimalkan dan mensinergikan peran pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kerawanan pangan, melalui pemantauan kondisi pangan dan gizi, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) tahun sebagai acuan dalam antisipasi dan penanganan daerah rawan pangan yang merupakan tindak lanjut hasil analisis SKPG.

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Kutai Kutai Barat melaksanakan kegiatan Analisis SKPG setiap bulan sebagai salah satu bagian dari tugas pokok dan fungsi yang wajib dilaksanakan. **Melakukan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi untuk menyediakan laporan dan rekomendasi kebijakan dalam penanganan rawan pangan pada suatu wilayah (Kampung) dari 16 Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sehingga ketersediaan pangan dan gizi disetiap kampung tercukupi.**



PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP KERAWANAN PANGAN

Masyarakat memiliki peranan penting dalam pembangunan ketahanan pangan. Tidak hanya dari profesi Petani, tetapi juga Tenaga Kesehatan, Ibu Rumah Tangga, Tenaga Pendidik, Pedagang, dan Engineer juga ikut serta dalam membangun ketahanan pangan sehingga mengurangi kasus kerawanan pangan. Pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana untuk melakukan pembangunan pangan, sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama atau dalam melakukan kegiatan pembangunan pangan, baik itu untuk ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Hal ini membuktikan bahwa dalam membangun ketahanan pangan, perlu kerjasama antara masyarakat dan pemerintahan.